

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD)
DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN
(Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012)**



NASKAH PUBLIKASI

Oleh :

YULIANA

NIM : B 200 090 024

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2013

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DITINJUA DARI RASIO KEUANGAN

(Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012)

Yang disusun oleh :

YULIANA

B 200 090 024

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, 2013

Pembimbing



(Dra. Nursiam, Ak, M.H)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**ANALISIS KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD)
DITINJAU DARI RASIO KEUANGAN
(Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012)**

**Yuliana
B 200 090 024**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen ditinjau dari rasio keuangan periode 2010-2012. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sragen, sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2010-2012. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

Metode yang digunakan adalah deskriptif komparatif dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas dan efisiensi, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan dengan angka rasio rata-rata 10,60% masih berada diantara 0-25%, tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Rasio efektifitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PADnya telah dapat melampaui anggaran yang ditetapkan dan rasio efisiensi mengalami kenaikan. Rasio aktivitas menunjukkan pelaksanaan pembangunan semakin menurun dari tahun ke tahun. Rasio pertumbuhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Kata kunci : Kinerja APBD, Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Efisiensi, Rasio Aktivitas, Rasio Pertumbuhan

PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Mardiasmo (2002) dalam Setiaji (2007) mengatakan bahwa sebelum era otonomi harapan yang besar dari pemerintah daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan.

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan implementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber – sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 10 menyebutkan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah antara lain berasal dari Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Disamping Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat, daerah juga dapat membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, BUMD dan Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa PAD inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dan diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini, kemandirian daerah dapat diwujudkan lewat struktur PAD yang kuat.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, meskipun jumlahnya relatif memadai yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Usaha pemerintah daerah dalam menggali sumber dana yang berasal dari potensi daerah yang

dimiliki serta kemampuan mengelola dan memanfaatkan sumber dana yang ada tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Pengukuran kinerja berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam menentukan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga digunakan untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauhmana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerah, melihat kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan dan perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu. Oleh karena itu, kreatifitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber -sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Dilihat Dari Rasio Keuangan (Studi Kasus di Kabupaten Sragen Periode 2010-2012)”**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Sragen ditinjau dari rasio keuangan periode 2010 - 2012?”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Sragen ditinjau dari rasio keuangan periode 2010 – 2012.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Menurut UU No.32 Tahun 2004 yang dimaksud otonomi daerah adalah berhubungan dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas, akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Menurut UU No.32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal dan terpadu, secara nyata dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dalam campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

2. Manajemen Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai

oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:18).

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah :

- a. Transparansi
- b. Akuntabilitas
- c. *Value for Money*

3. Penganggaran Daerah

Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Di dalam pelaksanaannya, APBD mempunyai beberapa fungsi, yaitu (Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 16): fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

4. Laporan Pertanggungjawaban APBD

Menurut *Government Accounting Standard Board* (GASB, 1998) pelaporan keuangan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna untuk :

- 1) Membantu memenuhi kewajiban pemerintah untuk menjadi akuntabel terhadap publik.
- 2) Membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi dan oleh sebab itu mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Untuk tujuan tersebut, pelaporan keuangan harus mempertimbangkan kebutuhan para pengguna dan keputusan yang mereka buat.

Laporan keuangan yang disampaikan setidaknya meliputi :

a) Laporan Realisasi APBD

Laporan ini menyajikan informasi perbandingan antara realisasi dengan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan setiap fungsi, organisasi dan jenis selama satu tahun anggaran.

b) Neraca

Neraca menyajikan informasi posisi keuangan pemda mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal akhir tahun anggaran.

c) Laporan Arus Kas

Laporan ini menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemda selama satu tahun anggaran.

d) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi APBD, neraca, dan laporan arus kas.

5. Analisis Rasio Keuangan pada APBD

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan (Halim, 2008:232). Hasil analisis rasio tersebut dapat digunakan untuk (Halim, 2008:230) :

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah;
- b. Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah;
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah;
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Macam-macam Rasio Keuangan

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD.

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{sumber pendapatan dari pihak ekstern}} \times 100\%$$

Paul Harsey dan Kennerth Blancard memperkenalkan “hubungan situasional” dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2002:168-169) :

- 1) Pola Hubungan Instruktif

Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat bergantung pada pemerintah pusat yang berarti daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 2) Pola Hubungan Konsultif

Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat berkurang yang berarti daerah tersebut dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 3) Pola Hubungan Partisipatif

Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.

- 4) Pola Hubungan Delegatif

Apabila tingkat kemandirian 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah

pusat sudah tidak ada karena daerah tersebut telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

b. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemda/pemkot memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin adn belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi/pembangunan yang digunakan menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

$$\text{Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah/pemerintah kota dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen penerimaan (PAD dan total pendapatan) dan pengeluaran (belanja pembangunan).

Rasio pertumbuhan :

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Oprasional

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = tahun yang dihitung

X_{n-1} = tahun sebelumnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, obyek, atau peristiwa. Dalam hal ini mendapatkan gambaran tentang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen apabila ditinjau melalui analisis rasio keuangan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dan melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data tersebut merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010-2012.

Sumber data dari penelitian ini diperoleh langsung dari bagian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara yang dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio keuangan yaitu:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

2. Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio Aktivitas

$$= \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total APBD}} \times 100\%$$

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

X_n = tahun yang dihitung

X_{n-1} = tahun sebelumnya

HASIL PENELITIAN

1. Rasio Kemandirian = $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$

Rasio kemandirian Kabupaten Sragen tahun 2010-2012

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Total Sumber Pendapatan Eksternal	Rasio Kemandirian
2010	79.705.989.362	781.926.559.409	10,19%
2011	94.518.999.398	919.462.231.841	10,28%
2012	127.695.844.300	1.128.084.871.656	11,32%

Sumber data sekunder

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa tahun 2010 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah hanya sebesar 10,19%. Hal ini berarti bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam membiayai kegiatan pemerintahannya termasuk dalam golongan instruktif. Ini disebabkan karena PAD yang dihasilkan lebih kecil bila dibanding dengan Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern.

Tahun 2011 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengalami kenaikan yaitu sebesar 10,28%. Tetapi kemampuan dalam membiayai pemerintahannya masih dalam golongan instruktif. Kenaikan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tersebut dipengaruhi oleh perkembangan Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern yang diimbangi dengan perkembangan PAD.

Dan pada Tahun 2012 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah semakin meningkat sebesar 11,32%, tetapi kemampuan dalam membiayai pemerintahannya masih termasuk dalam golongan instruktif. Kenaikan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tersebut dipengaruhi oleh perkembangan Sumber Pendapatan dari Pihak Ekstern yang diimbangi dengan perkembangan PAD.

2. Rasio Efektifitas dan Efisiensi PAD

$$a. \text{ Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio Efektifitas Kabupaten Sragen tahun 2010-2012

Tahun	Target Penerimaan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas
2010	80.619.139.000	79.705.989.362	98,87%
2011	96.723.672.000	94.518.999.398	97,72%
2012	95.013.479.000	127.695.844.300	134,40%

Sumber data sekunder

Pada tahun 2010 target penerimaan PAD Kabupaten Sragen sebesar Rp80.619.139.000 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp79.705.989.362 sehingga Rasio Efektifitas sebesar 98,87%. Hal ini disebabkan oleh pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain pendapatan asli daerah yang sah lebih rendah dari yang ditargetkan.

Pada tahun 2011 target penerimaan PAD Kabupaten Sragen sebesar Rp96.723.672.000 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp94.518.999.398 sehingga Rasio Efektifitas turun menjadi 97,72%. Karena realisasi penerimaan PAD lebih rendah dari PAD yang ditargetkan, hal ini disebabkan oleh lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan.

Pada tahun 2012 target penerimaan PAD Kabupaten Sragen sebesar Rp95.013.479.000 dan realisasi penerimaan PAD sebesar Rp127.695.844.300 sehingga Rasio Efektifitas mengalami peningkatan sebesar 134,40%. Karena realisasi penerimaan PAD lebih tinggi dari PAD yang ditargetkan, hal ini disebabkan oleh pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan.

- b.
$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

 Rasio Efisiensi Kabupaten Sragen Tahun 2009-2011

Tahun	Biaya Untuk Memungut PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi
2010	1.717.728.952	79.705.989.362	2,16%
2011	1.888.681.366	94.518.999.398	2,00%
2012	2.191.569.303	127.695.844.300	1,71%

Sumber data sekunder

Hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Sragen tahun 2010 biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD sebesar Rp1.717.728.952 dan PAD yang berhasil diperoleh sebesar Rp79.705.989.362. Dengan demikian diperoleh rasio Efisiensi sebesar 2,16% yang berarti bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten sragen dalam mengumpulkan PAD sudah efisien,karena biaya yang digunakan untuk memungut PAD lebih rendah dibanding dengan PAD yang diperoleh.

Pada tahun 2011 PAD yang diperoleh sebesar Rp94.518.999.398 dan biaya yang digunakan untuk memungut PAD mengalami penurunan sebesar Rp1.888.681.366 karena pendapatan pajak daerah mengalami penurunan, sehingga diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 2,00%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dalam upayanya mengumpulkan PAD sudah efisien.

Pada tahun 2012 PAD yang diperoleh sebesar Rp127.695.844.300 tetapi biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD mengalami peningkatan sebesar Rp2.191.569.303 karena pendapatan pajak daerah dan pajak retribusi daerah mengalami kenaikan, sehingga diperoleh Rasio Efisiensi sebesar 1,71%. Hal ini berarti kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen dalam upayanya mengumpulkan PAD sudah efisien.

$$3. \text{ Rasio Aktivitas} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja APBD}} \times 100\%$$

Rasio Aktivitas Kabupaten Sragen Tahun 2010-2012

Tahun	Total Belanja Pembangunan (Rp)	Total APBD (Rp)	Rasio Aktifitas
2010	903.716.543.562	883.227.171.772	102,32%
2011	1.030.854.864.744	1.094.585.823.239	94,18%
2012	1.197.434.071.270	1.308.940.381.569	91,48%

Sumber data sekunder

Dari Hasil perhitungan Rasio Aktivitas pemerintah Kabupaten Sragen tahun 2010 total belanja pembangunan sebesar Rp903.716543.562 dan total APBD sebesar Rp883.227.171.772. Dengan demikian diperoleh Rasio Aktifitas sebesar 102,32%. Hal ini berarti pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen mengalami kenaikan.

Pada tahun 2011 total belanja pembangunan naik sebesar Rp1.030.854.864.744 dan total APBD sebesar Rp1.094.585.823.239 sehingga diperoleh Rasio Aktifitas sebesar 94,18%. Rasio Aktifitas tahun 2011 mengalami penurunan hal in disebabkan belanja modal dan belanja operasi tidak melebihi dari yang ditargetkan.

Pada tahun 2012 belanja pembangunan naik sebesar Rp1.197.434.071.270 dan total APBD sebesar Rp1.308.940.381.569 sehingga diperoleh Rasio Aktifitas sebesar 91,48%. Rasio Aktifitas tahun 2012 mengalami penurunan hal in disebabkan belanja modal dan belanja operasi tidak melebihi dari yang ditargetkan.

4. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan PAD

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan

$$= \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio pertumbuhan Belanja Operasional

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Operasional } X_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Belanja Modal

$$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Modal } X_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

X_n = tahun yang dihitung

X_{n-1} = tahun sebelumnya

Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2009-2011

Keterangan	2010	2011	2012
Rasio Pertumbuhan PAD	-	18,58%	35,10%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan	-	23,93%	19,58%
Rasio Pertumbuhan Belanja Operasional	-	17,49%	11,62%
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	-	-17,98%	77,18%

1. Rasio Pertumbuhan PAD

Pada tahun 2010 PAD sebesar Rp79.705.989.362 mengalami kenaikan di tahun 2011 sebesar Rp94.518.999.398 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD tahun 2011 sebesar 18,58%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 18,58%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan PAD yang ditunjukkan dengan kenaikan dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

Tahun 2012 PAD juga mengalami kenaikan sebesar Rp127.695.844.300 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan PAD sebesar 35,10%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Sragen telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan PAD yang ditunjukkan dengan kenaikan PAD dari sektor Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang sah. Hal ini berarti dari tahun ke tahun PAD di Kabupaten Daerah Sragen mengalami kenaikan.

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Pada tahun 2010 pendapatan sebesar Rp883.227.171.771 mengalami kenaikan di tahun 2011 sebesar Rp1.094.585.823.239 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Pendapatan tahun 2011 sebesar 23,93%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan pendapatan dari tahun 2010 ke tahun 2011 sebesar 23,93%. Pertumbuhan ini disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen telah berhasil mengoptimalkan kemampuannya dalam meningkatkan perolehan pendapatan.

Tahun 2012 pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar Rp1.308.940.381.569 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Pendapatan sebesar 19,58%.

3. Rasio Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2010 sebesar Rp816.477.537.101 mengalami kenaikan di tahun 2011 menjadi Rp959.299.807.205 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi tahun 2011 sebesar 17,49%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah.

Belanja Operasi tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi Rp1.070.743.102.531 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi tahun 2012 sebesar 77,18%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh naiknya Belanja Aparatur Publik dan Belanja Aparatur Daerah.

4. Rasio Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2010 sebesar Rp86.363.572.161 mengalami penurunan pada tahun 2011 menjadi sebesar Rp70.836.780.279 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2011 sebesar -17,98%. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh Belanja Modal yang masih rendah. Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Sragen dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal masih kurang baik.

Belanja Modal mengalami kenaikan di tahun 2012 menjadi Rp125.506.270.939 sehingga diperoleh Rasio Pertumbuhan Belanja Modal tahun 2012 sebesar 77,18%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh belanja modal yang semakin meningkat. Hal ini berarti kinerja keuangan Kabupaten Sragen dilihat dari perolehan Rasio Pertumbuhan Belanja Modal semakin baik.

Rasio Pertumbuhan yang cenderung naik dari tahun ke tahun menandakan keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sragen dan profesionalisme Kabupaten Sragen dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan pada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tahun 2010-2012 dapat disimpulkan bahwa kinerja APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen tahun 2010-2012 sudah baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan rasio kemandirian masih rendah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal masih tinggi, rasio efektivitas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD telah melampaui anggaran yang ditetapkan dan rasio efisiensi telah mengalami kenaikan, rasio aktivitas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan semakin menurun dari tahun ke tahun., rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, keterbatasan dalam penelitian ini antara lain periode penelitian yang pendek, penelitian ini tidak menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga tidak dapat memperoleh hasil analisis yang lengkap, perhitungan penelitian ini hanya difokuskan empat model analisis rasio keuangan sehingga tidak didapat hasil analisis yang lengkap dan menyeluruh.

3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data serta kesimpulan, penulis mencoba mengajukan saran yaitu bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah rasio yang digunakan, obyek penelitian, tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariana, Hermawati, Suharyono dan Devianti, Dwi Risma. 2012. *Analisis Pendapatan dan Belanja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ekonomi Universitas Mulawarman.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta : Salemba Empat.
- , 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi, Yogyakarta : AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- , 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Mulyana, Budi. 2006. *Perspektif Desentralisasi Fiskal dan Pengelolaan APBD di Indonesia*. Edisi Pertama, Jakarta: LPKPAP.
- Nataluddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Pada Penerimaan Daerah di Propinsi Jambi: Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Noerdiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 *Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2011 *Tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Paidi, Hidayat, Pratomo, Wahyu Ario dan Harjito, D. Agus. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.12, No.3, Hal 213-222, Desember 2007.
- Setiaji, Wirawan dan Adi, Priyo Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran?.* SNA, 10, 26-28 Juli 2007.
- Sularmi dan Agus Endro Suwarno. 2006. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau dari Aspek Keuangan*. Jurnal Akuntansi Keuangan. Volume 5, No 1, April 2006.
- Susilo, Gideon Tri Budi dan Hariadi, Priyo. 2007. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi (Studi Empiris Di Propinsi Jawa Tengah)*. Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama, 25-26 April 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2008. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.

Wahyuni, Nanik. 2007. *Analisis Rasio untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Malang*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Malang.